

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Batubara dan Hukum Pertambangan

1. Pengertian Batubara

Pengertian batubara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu :¹

“Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”

Sedangkan dalam pengertian lainnya di dalam KBBI, batubara adalah arang yang diambil dari dalam tanah, berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air, dan sebagainya yang telah menjadi batu.²

Menurut Sukandarrumidi dalam Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc³ batubara adalah batuan sedimen (padatan) yang dapat terbakar, berasal dari tumbuhan dan berwarna coklat sampai hitam yang pada saat pengendapannya terkena proses fisika dan kimia yang menjadikan kandungan karbonnya kaya. Endapan batubara di Indonesia tersebar dari Sumatera sampai Papua. Endapan tersebut paling banyak ditemukan di wilayah Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan Badan Geologi menyatakan bahwa jumlah

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 2009

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/batu%20bara> , diakses pada tanggal 11 Februari 2020

³ Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc, *“Batubara Indonesia”* PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. xvii

sumberdaya batubara mencapai 161 milyar ton serta cadangannya mencapai 28 milyar ton sehingga dengan jumlah tersebut cadangan batubara di Indonesia hanya sebanyak 0,6% dari jumlah cadangan yang ada di seluruh dunia.⁴

Batubara dikenal sebagai “emas” hitam karena masyarakat mengenalnya sebagai batu hitam yang bisa terbakar. Menurut seorang ahli geokimia batubara Elliot dalam Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc⁵ berpendapat bahwa batubara merupakan batuan sedimen yang secara fisika dan kimia yaitu heterogen yang mengandung unsur-unsur hydrogen, karbon, dan oksigen sebagai komponen unsur utama dan belerang serta nitrogen sebagai unsur tambahan. Selain itu ada pula zat lain yaitu senyawa anorganik pembentuk ash (debu) yang tersebar sebagai partikel zat mineral yang terpisah pada seluruh senyawa batubara.

Batubara merupakan salah satu komoditi tambang yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan bahwa produksi batubara pada tahun 2019 mencapai 610 juta ton bahkan melebihi target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2019 yang sebesar 489

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid.*, hlm.3-4

juta ton, pada tahun 2020 target produksi batubara ditetapkan sebesar 550 juta ton dengan memperkirakan produksi batubara pada tahun 2019.⁶

Peningkatan produksi batubara Indonesia dipicu oleh kenaikan permintaan pada pasar ekspor batubara Indonesia yang salah satunya adalah negara Cina. Berkaitan dengan pembatasan impor batubara dari Australia dengan pemberlakuan peraturan pengiriman barang yang semakin ketat. Sehingga hal tersebut menyebabkan permintaan batubara dari Cina kepada Indonesia mengalami peningkatan. Setiap tahunnya lebih dari 70% dari total produksi batubara Indonesia dikirim untuk memenuhi permintaan importir batubara di luar negeri sedangkan sisanya untuk memenuhi konsumsi batubara domestik.⁷

Menurut Adiatma dalam Deon Arinaldo⁸ mengemukakan konsumsi domestik juga diperkirakan akan naik akibat peningkatan konsumsi batubara per unit produksi listrik. Sebuah analisis pada statistik pembangkit listrik tenaga batubara PLN menunjukkan bahwa ada peningkatan konsumsi batubara sebesar 44% selama 15 tahun terakhir. Kemudian ada dua faktor utama yang memengaruhi peningkatan ini yaitu rendahnya

⁶ Verda Nano Setiawan, “Kementerian ESDM Patok Produksi Batubara 550 Juta Ton Tahun Ini” <https://katadata.co.id/berita/2020/01/09/kementerian-esdm-patok-produksi-batu-bara-550-juta-ton-tahun-ini> diakses 3 Maret 2020

⁷ IPB, “Gambaran Umum Pertambangan Batubara” <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/58162/4/BAB%20IV%20Gambaran%20Umum.pdf>, diakses 11 Februari 2010

⁸ Deon Arinaldo, “Dinamika Batubara Indonesia: Menuju Transisi Energi yang Adil” Institute for Essential Services Reform (IESR), Jakarta, 2019, hlm.4 <http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2019/04/SPM-bahasa-lowres.pdf> , diakses 11 Februari 2010

efisiensi pembangkit listrik tenaga batu bara dan penggunaan lignit yang memiliki nilai kalorifik lebih rendah (<4.200 kcal).

Adiatma dalam Deon Arinaldo⁹ menyampaikan bahwa sumber dan produksi batubara Indonesia sebagian besar hanya tersebar di empat dari 34 provinsi: Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Cekungan batu bara Kutai, Tarakan, dan Barito yang terletak di Kalimantan Timur memiliki batu bara kualitas menengah (nilai kalorifik antara 5.100-6.100 kcal/kg) sementara cekungan Sumatera Tengah dan Selatan memiliki cadangan batubara kualitas rendah (nilai kalorifik <5.100 kcal/kg).

2. Hukum Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”

Sedangkan pengertian pertambangan batubara diatur pada pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dengan bunyi sebagai berikut:

“Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal”

⁹ *Ibid.*, hlm.5

Van Apeldorn¹⁰ menyatakan bahwa hukum sebenarnya sukar untuk didefinisikan tetapi dalam rangka mempermudah pembahasan dalam uraian selanjutnya kiranya sangat penting diberikan batasan tentang hukum pertambangan yaitu sekedar memberikan definisi kerja. (www.bphn.go.id) Pengertian dari Hukum Pertambangan secara sederhana dapat dirumuskan dengan bunyi:

“sekumpulan kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang kebijakan, larangan, perijinan, kebolehan, perjanjian kerjasama dan pengawasan terhadap pengusahaan bahan galian di Indonesia”

Pada Ensiklopedia Indonesia yang dimaksud hukum pertambangan ialah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah. Pengertian tersebut hanya difokuskan pada aktifitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung di dalam perut bumi. Pada pengertian ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Menurut *Black law Dictionary* Hartana¹¹ hukum pertambangan adalah: “*the act appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal itssoil or rock) according to certain*

¹⁰ BPHN, “Analisis dan Evaluasi Kerjasama Dalam Usaha Pertambangan”
<https://www.bphn.go.id/data/documents/pertambangan.pdf> diakses 11 Februari 2020

¹¹ Hartana, “Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)” Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.3 No.1, Februari 2017, hlm.54
<http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/838727> ,diakses 12 Februari 2020

established rule” yang artinya ialah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Salim HS dalam Hartana¹² yang mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah:

"keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)"

Menurut Salim HS dalam Dewi Tuti Muryati dkk¹³ menyampaikan pula bahwa hukum pertambangan dikelompokkan menjadi dua macam antara lain hukum pertambangan umum yaitu mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radio aktif, mineral dan batubara, serta air tanah. Serta hukum pertambangan khusus yaitu hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

Menurut Hannah Owusu-Koranteng At dalam Dr. H. Salim HS., S.H., M.S¹⁴ menjelaskan pengertian *Mining Law* (hukum pertambangan) sebagai berikut:

“Surface mining is one of the most polluting investments and mining laws that regulate the activities of mining companies should have the objective of providing adequate protection for the right or

¹² *Ibid*, hlm.54

¹³ Dewi Tuti Muryati dkk, “Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan” Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.18 No.1, Juni 2016
<http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/viewFile/556/367> , diakses 12 Februari 2020

¹⁴ Dr. H. Salim HS., S.H., M.S, “*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*” Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.13

mining communities, the environment as well as ensure equal benefits to the host countries and the investor. An important characteristic of the mining and mineral law in Ghana is the clear protection of the interests of multinational mining companies whilst the protection of community rights and the environment is fluid”

Menurut Munir Bustami dalam Hartana¹⁵ berpendapat secara sederhana bahwa hukum pertambangan adalah himpunan ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang pertambangan, kegiatan usaha, kelembagaan serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Munir Bustami berpendapat pula bahwa sumber hukum pertambangan dapat dikategorikan menjadi dua antara lain sumber materil yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut pandang mana dilakukan peninjauannya baik itu dari sudut pandang ekonomi, sosiologis, sejarah, filsafat, dan lainnya. Kemudian kebutuhan kebutuhan terhadap tambang dalam suatu masyarakat itulah yg menimbulkan isi hukum pertambangan. Sedangkan, sumber yaitu ditemukannya ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak di masyarakat yang berkaitan dengan pertambangan.

Selain itu, hukum pertambangan dibagi pula menjadi hukum pertambangan tertulis dan hukum pertambangan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat.

¹⁵ Hartana, *Op. Cit*, hlm.55

Sedangkan hukum pertambangan tidak tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang hidup dan berkembang di dalam ruang lingkup masyarakat yang bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal sehingga hanya berlaku di daerah setempat saja.¹⁶

B. Asas-Asas Hukum Pertambangan dan Wilayah Pertambangan

1. Asas-Asas Hukum Pertambangan

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memuat 8 (delapan) asas-asas hukum pertambangan yang akan diuraikan penjelasannya sebagai berikut:¹⁷

a. Manfaat

Asas ini merupakan pedoman dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat diberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat yang mana dikembangkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*). Konsep tersebut dimaksudkan untuk mendefinisikan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Namun sebaliknya apabila sesuatu menimbulkan sakit adalah buruk, sehingga tindakan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness principle*).

¹⁶ Viktor I. Surypatty, Tesis “*Paradigma Baru Hukum Pertambangan Indonesia Mengganti Sistem Kontrak Karya Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral*” Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.15 <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-2/20270057-T37354-Viktor%20I%20Suripatty.pdf> , diakses 12 Februari 2020

¹⁷ Dr. H. Salim HS., S.H., M.S, *Op.Cit.*, hlm. 22

b. Keadilan

Asas ini merupakan pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara di mana dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rata dan rasa bagi masyarakat banyak yang mana dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara serta juga dibenani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena selama ini masyarakat kurang mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara.

c. Keseimbangan

Asas ini merupakan pedoman yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin. Artinya pemberi izin bisa menuntut hak-haknya kepada pemegang izin seperti perizinan usaha pertambangan, begitu juga sebaliknya pemegang izin bisa menuntut haknya kepada pemberi izin untuk melaksanakan kewajibannya seperti melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin.

d. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa

Asas ini merupakan pedoman bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah haruslah memihak kepada kepentingan bangsa

karena kepentingan bangsa harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan para investor, walaupun demikian pemerintah harus memperhatikan kepentingan investor.

e. Partisipatif

Asas ini merupakan pedoman bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya peran pemberi izin dan pemegang izin semasa-mata namun masyarakat khususnya yang berada di lingkup tambang harus pula ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Tujuan peran serta masyarakat agar masyarakat dapat ikut bekerja pada perusahaan tambang baik itu menjadi pengusaha maupun distributor.

f. Transparansi

Asas ini merupakan pedoman bahwa dalam melaksanakan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara terbuka yaitu setiap informasi yang telah disampaikan oleh pemberi izin dan pemegang kepada masyarakat, sehingga harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka. Misal mengenai tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja dan lain sebagainya.

g. Akuntabilitas

Asas ini merupakan pedoman bahwa setiap kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa kepatutan dan keadilan. Sehingga asas tersebut memiliki kaitan yang erat dengan hak-hak yang

akan diterima oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Missal pemegang IUPK memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah dalam hal ini DPRD kabupaten/kota maupun provinsi sebesar 1 % maka pemanfaatan uang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

h. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Asas ini merupakan pedoman yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di dalam keseluruhan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa datang.

2. Wilayah Pertambangan

Definisi wilayah pertambangan atau dalam bahasa Inggrisnya *mining area* disebutkan dalam seksi 3 huruf a *the Philippine Mining Act of 1995* dalam buku Dr. H. Salim HS., S.H., M.S yang berjudul Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara¹⁸, yang berbunyi:

“A portion of the contract area identified by the contractor for purposes of development, mining, utilization, and site for support facilities or in the immediate vicinity of the mining operation”

Dalam definisi tersebut berarti wilayah pertambangan dikonstruksikan sebagai wilayah kontrak karena di dalam sistem hukum Philipina sistem pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan menggunakan

¹⁸ *Op.Cit.*, hlm.75

sistem kontrak. Sedangkan definisi dari wilayah pertambangan berdasarkan pasal 1 ayat (29) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:¹⁹

“Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional”

Ada 3 (tiga) hal yang diatur mengenai wilayah pertambangan di dalam pasal 9 sampai dengan pasal 33 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yaitu penetapan wilayah pertambangan, penggolongan wilayah pertambangan dan kriteria yang digunakan dalam penetapan wilayah pertambangan. Selain itu diatur pula pada Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan terdapat 3 (tiga) hal yang diatur yaitu perencanaan wilayah pertambangan, penetapan wilayah pertambangan, serta data dan informasi.²⁰

Penetapan mekanisme pengelolaan dan usaha pertambangan yang dimulai dari zonasi yang memiliki kapasitas akan bahan galian merupakan kemajuan yang sinkron dengan tantangan dan kemajuan zaman. Bahwa dari penetapan wilayah pertambangan akan dapat dilaksanakan suatu perencanaan pengelolaan dan usaha bahan galian yang kemudian diunifikasi dengan perencanaan pembangunan secara keseluruhan, dengan demikian wilayah yang dijadikan pertambangan akan menjadi lebih siap untuk

¹⁹ Pasal 1 ayat (29) Undang-Undang No.4 Tahun 2009

²⁰ *Op.Cit.*, hlm.75

dilakukan pengelolaan baik dari aspek sosial maupun ekonomi apabila kegiatan usaha pertambangan di wilayah tersebut telah selesai dilakukan. Ada 3 (tiga) mekanisme penetapan ruang lingkup wilayah pertambangan yang diatur pada pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 yang meliputi:

- a. Penetapan suatu wilayah pertambangan wajib dilakukan setelah berkoordinasi dengan DPR, pemerintah daerah, dan pendapat instansi terkait serta masyarakat.
- b. Penetapan dilakukan melalui proses yang transparan, partisipatif, serta bertanggung jawab.
- c. Penetapan dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi serta berwawasan lingkungan²¹

Wilayah dapat ditinjau kembali selama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengusulkan perubahan wilayah pertambangan (WP) kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.²²

Pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 wilayah pertambangan dibagi menjadi 6 (enam) golongan antara lain:

- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

²¹ Nandang Sudjarat, *“Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia”* Medpress Digital: Yogyakarta, 2013, hlm.81

²² *Op.Cit.*, hlm.85

- b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kriteria untuk menentukan WIUP yaitu letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara, dan tingkat kepadatan penduduk.
- c. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kriteria untuk menentukan WPR yaitu mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai, mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter, luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar, menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang, merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN, merupakan Kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang, serta merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba.
- d. Wilayah Pencadangan Negara (WPN), bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
- e. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), adalah bagian dari wilayah pencadangan negara yang dapat diusahakan.

- f. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

C. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

1. Pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pertambangan rakyat merupakan suatu persoalan krusial di dalam bidang pertambangan walaupun diusahakan secara tradisional namun terkadang meliputi wilayah yang cukup luas maka pelaku usaha pertambangan juga banyak yang melakukan usaha pertambangan. Berdasarkan kondisi yang ada pertambangan rakyat berbeda jauh dengan pertambangan yang dilaksanakan oleh badan usaha, karena keadaan yang minim peralatan, pengetahuan, fasilitas serta permohonan. Dampak yang muncul ialah pertambangan rakyat dilakukan tanpa izin (PETI), rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan pekerja serta menimbulkan kerusakan lingkungan. Sehingga para perumus dan pembuat undang-undang mengakomodasi kepentingan rakyat dengan mengeluarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memuat mengenai Izin Pertambangan Rakyat.²³

Definisi dari izin pertambangan rakyat (IPR) diatur pada pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan bunyi sebagai berikut:²⁴

²³ Nandang Sudjarat, *Op.Cit.*, hlm.96

²⁴ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.4 Tahun 2009

“Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”

Selain itu, definisi izin pertambangan rakyat (IPR) diatur juga pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No.75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dengan bunyi sebagai berikut.²⁵

“Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk izin pertambangan rakyat (IPR) yaitu ada izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, ada usaha pertambangan, adanya wilayah untuk pertambangan rakyat, luas wilayah yang terbatas serta investasi terbatas.²⁶ Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di lingkaran wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan inventasi dan wilayah terbatas. Oleh karena itu, modal yang dimiliki oleh pemegang IPR untuk melakukan usaha pertambangan rakyat tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan

²⁵ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001

²⁶ Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., *Op.Cit.*, hlm.90

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau pemegang IUP khusus.²⁷

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin pertambangan rakyat (IPR) antara lain:²⁸

- a. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait rumusan izin pertambangan rakyat (IPR);
- b. Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait rumusan wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- c. Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait aturan kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan;
- d. Pasal 21 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait aturan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- e. Pasal 22 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait kriteria untuk penerapakan wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- f. Pasal 24 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait aturan wilayah atau tempat kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan namun belum ditetapkan sebagai WPR diutamakan untuk ditetapkan sebagai WPR;
- g. Pasal 25 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur dan penetapan wilayah

²⁷ Tri Hayati, “*Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*” Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.175-176

²⁸ *Op.Cit.*, hlm.92-93

pertambangan rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten/Kota;

- h. Pasal 26 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait aturan kriteria dan mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- i. Pasal 35 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin pertambangan rakyat (IPR);
- j. Pasal 67 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait orang-orang yang berhak mengajukan IPR;
- k. Pasal 68 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait aturan luas wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- l. Pasal 69 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait hak pemegang izin pertambangan rakyat (IPR);
- m. Pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat (IPR);
- n. Pasal 72 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait pemberian izin pertambangan rakyat (IPR);
- o. Pasal 73 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait pembinaan;
- p. Pasal 104 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait larangan pengolahan dan pemurnian;
- q. Pasal 131 dan pasal 132 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait besaran pajak yang wajib dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat(IPR);

- r. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
- s. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Usaha Pertambangan;
- t. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan IPR

Izin Pertambangan Batubara (IPR) hanya dapat diajukan oleh penduduk setempat yang mana orang atau kelompok yang mendiami suatu tempat yang berada di wilayah pertambangan rakyat. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi penduduk setempat yaitu perorangan, kelompok dan/atau koperasi. Apabila perorangan mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat (IPR) seorang diri, maka kelompok mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat (IPR) terdiri dua orang atau lebih. Kemudian koperasi adalah suatu badan usaha yang anggotanya adalah orang atau badan hukum hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi dalam kegiatan pertambangan serta pula sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.²⁹ Kemudian pejabat yang berwenang untuk pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) yaitu Bupati/Walikota, namun dapat pula dilimpahkan kepada camat untuk pelaksanaan pemberian izin

²⁹ *Op.Cit.*, hlm.94

pertambangan rakyat (IPR) dan sebelum IPR diberikan Bupati/Walikota menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

“Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil”

3. Prosedur dan Syarat-Syarat untuk Memperoleh IPR

Izin pertambangan rakyat (IPR) dapat diajukan bagi setiap masyarakat baik itu individual maupun kelompok serta koperasi. Agar dapat memperoleh izin, maka harus menempuh prosedur dan memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Prosedur yang dipenuhi oleh pemohon IPR yaitu mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Walikota dengan mencakup materai cukup serta dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat terkait kebenaran riwayat pemohon IPR untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR) serta harus memenuhi tiga syarat yaitu:³⁰

³⁰ *Ibid.*, hlm.95-97

1. Administratif

Syarat ini berkaitan dengan administratif yang mana sebelum menetapkan IPR pejabat yang berwenang harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon IPR yang meliputi kelompok masyarakat, koperasi setempat, dan berkaitan dengan orang perseorangan. Syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi khususnya telah diatur pada pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi:³¹

“a. Perseorangan, paling sedikit meliputi :

1. surat permohonan;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. komoditas tambang yang dimohonkan; dan
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

b. Kelompok Masyarakat, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. komoditas tambang yang dimohonkan; dan
3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi :

1. surat permohonan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh. pejabat yang berwenang;
4. komoditas tambang yang dimohonkan; dan
5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.”

2. Finansial

Syarat ini ialah syarat yang berkaitan dengan laporan keuangan, laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir hanya diberlakukan bagi koperasi yang akan mengajukan IPR. Pada pasal 45 Peraturan Daerah

³¹ Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013

Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:³²

“Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.”

3. Teknis

Syarat teknis yaitu syarat yang berkaitan dengan cara pengambilan dan sistem untuk mengerjakan pertambangan. Maka pemohon IPR harus membuat surat pernyataan yang meliputi teknis pertambangan. Pada pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: ³³

“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

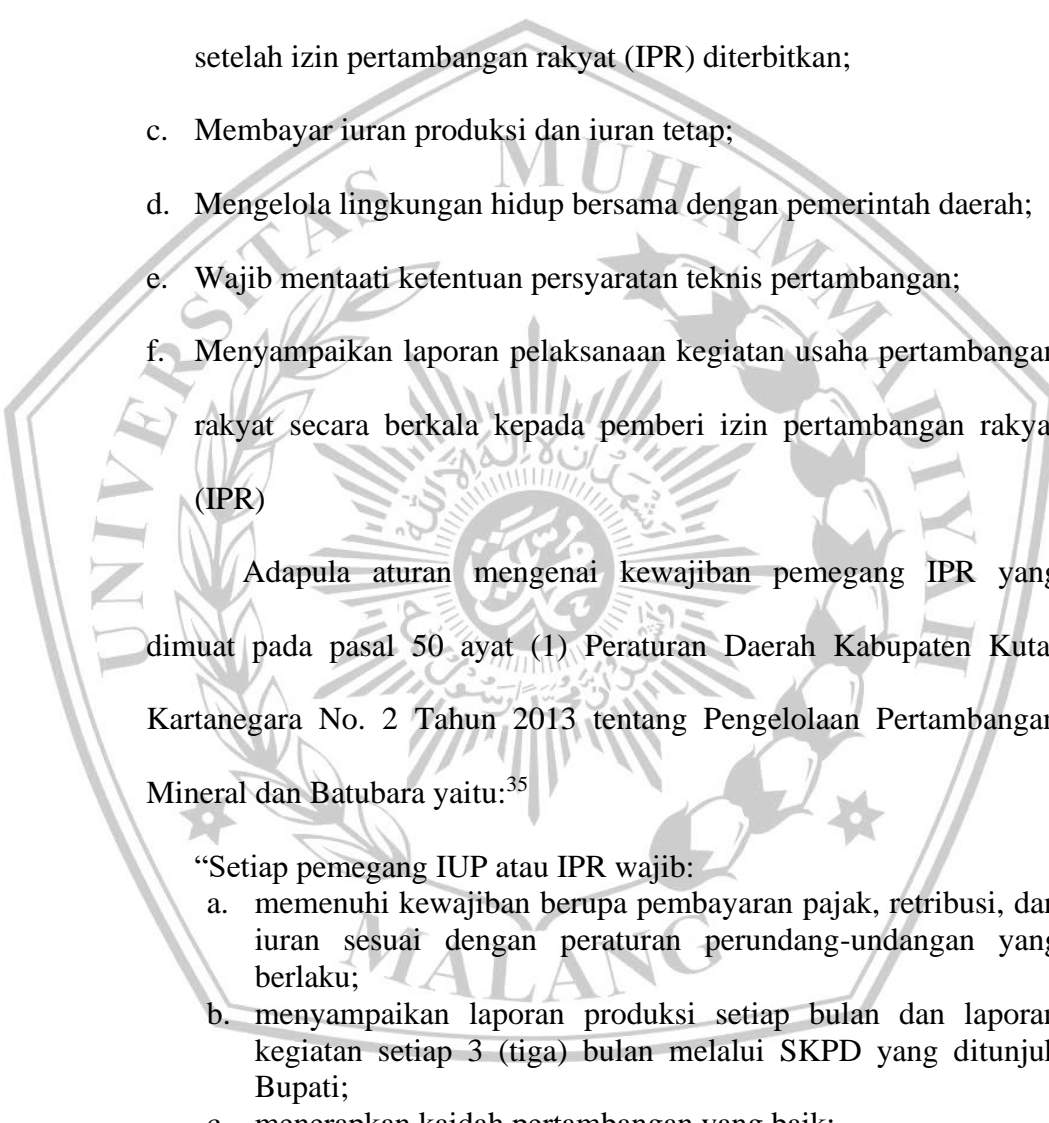
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) HP untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.”

Kemudian kepada pemohon yang memenuhi persyaratan diberikan izin pertambangan rakyat (IPR) dan bagi pemegang IPR memiliki kewajiban yang meliputi:³⁴

³² Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013

³³ Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013

³⁴ Tri Hayati, *Op.Cit.*, hlm.177-178

- 
- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, memenuhi standar yang berlaku dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin pertambangan rakyat (IPR) diterbitkan;
 - c. Membayar iuran produksi dan iuran tetap;
 - d. Mengelola lingkungan hidup bersama dengan pemerintah daerah;
 - e. Wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi izin pertambangan rakyat (IPR)

Adapula aturan mengenai kewajiban pemegang IPR yang dimuat pada pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:³⁵

“Setiap pemegang IUP atau IPR wajib:

- a. memenuhi kewajiban berupa pembayaran pajak, retribusi, dan iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan melalui SKPD yang ditunjuk Bupati;
- c. menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- d. mengelola keuangan berdasarkan standar akuntansi Indonesia;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- f. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara;

³⁵ Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013

- g. menyusun program dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar WIUP;
- h. wajib menjamin penerapan standar baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah Kutai Kartanegara;
- i. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- j. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri;
- k. menyampaikan seluruh data hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupati melalui SKPD yang diberi kewenangan; dan
- l. memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan dalam usaha pertambangan.”

4. Jangka Waktu Berlakunya dan Berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Jangka waktu berlakunya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diartikan dengan lamanya pemegang IPR untuk melaksanakan kegiatan pertambangan pada wilayah pertambangan yang telah ditentukan di dalam izin pertambangan rakyat (IPR) baik itu pihak perorangan, kelompok atau koperasi. Sehingga jangka waktu berlakunya izin pertambangan rakyat (IPR) maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.³⁶ Kemudian berakhirnya izin pertambangan rakyat diartikan bahwa tidak berlaku lagi izin yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) yang meliputi tiga alasan yaitu jangka waktu yang telah ditentukan dalam izin pertambangan rakyat (IPR) telah berakhir, ditinggalkan oleh pemegang IPR atau dicabut oleh Bupati/Walikota. Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah habis, maka dapat diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya.³⁷

³⁶ Dr. H. Salim HS., S.H., M.S, *Op.Cit.*, hlm.98

³⁷ *Ibid.*, hlm.100

D. Penegakan Hukum Pidana Bidang Pertambangan Batubara

1. Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada perundang-undangan pengertian dari *strafbaarfeit* meliputi:³⁸

- a. Pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 menggunakan istilah peristiwa pidana;
- b. Undang-Undang No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara menggunakan istilah perbuatan pidana;
- c. Undang-Undang No.2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* menggunakan istilah perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
- d. Undang-Undang Darurat No.16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menggunakan istilah hal yang diancam, dengan hukum;
- e. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Tentang Pengusutan , Penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi menggunakan istilah tindak pidana;
- f. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum menggunakan istilah tindak pidana;

³⁸ Tongat, S.H., M.Hum, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan", UMM Press, Malang, 2009, hlm.101-102

- g. Penetapan Presiden No.4 Tahun 1964 Tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatannya bagi Terpidana, menggunakan istilah tindak pidana.

Menurut Simons *strafbaarfeit* dapat didefinisikan sebagai perilaku yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu untuk bertanggung jawab. Selain itu Van Hammel juga mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai perilaku orang yang dirumuskan dalam wet yang memiliki sifat melawan hukum dan patut dipidana serta dilakukan dengan kesalahan.³⁹

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana sama artinya dengan istilah *criminal act* karena *criminal act* memiliki arti kelakuan dan akibat yang dipisahkan dari *criminal responsibility* atau pertanggung jawaban pidana. Sehingga agar adanya pertanggung jawaban pidana tidak hanya dengan dilakukan perbuatan pidananya saja namun harus ada unsur kesalahan juga.⁴⁰

Adapun istilah lain dari tindak pidana yaitu delik pidana, merupakan suatu perbuatan seseorang maupun kelompok yang menimbulkan peristiwa

³⁹ Tongat, S.H., M.Hum, *Op.cit.*, hlm.102

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.103-104

pidana atau perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁴¹

Seseorang dianggap melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur yang meliputi:⁴²

a. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan, ialah perbuatan yang diancam dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 362 KUHP, unsur obyektif berupa perbuatan serta sekaligus perbuatan yang diancam dan dilarang oleh KUHP merupakan perbuatan mengambil.
- 2) Akibat, ialah akibat-akibat yang diancam dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sekaligus sebagai syarat mutlak dalam tindak pidana.
- 3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh perundang-undangan yang berlaku

b. Unsur Subyektif

- 1) Pertanggung jawaban, ialah hal yang dapat dipertanggung jawabkan bagi seseorang terhadap tindakan yang telah dilakukan.

Terdapat 3 (tiga) syarat seseorang dianggap mampu untuk

⁴¹ Mokhammad Najih, S.H., M.Hum dan Soimin, S.H., M.H., “*Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*” Setara Press, Malang, 2014, hlm.175

⁴² Dr. Tongat, S.H., M.Hum, “*Hukum Pidana Materiil*” UMM Press, Malang, 2015, hlm.3-5

bertanggung jawab apabila keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga seseorang tersebut dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan, keadaan jiwa seseorang tersebut itu sedemikian rupa sehingga seseorang tersebut dapat menentukan kehendaknya terhadap tindakan yang dilakukan serta seseorang tersebut harus sadar perbuatan yang diancam dan dilarang di dalam perundang-undangan yang berlaku. Karena pembentuk KUHP berpendirian bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Sehingga mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak perlu untuk dibuktikan di muka pengadilan dikecualikan apabila seseorang tersebut memiliki keragu-raguan terhadap unsur tersebut. Pada pasal 47 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukan dikarenakan jiwanya cacat dalam tumbuhnya misalnya idiot, bisu tuli sejak lahir, imbisil, dan lain-lain. Kemudian apabila jiwanya terganggu karena suatu penyakit misalnya hysteria, melankolia, gila, maniak dan lain-lain.

- 2) Kesalahan (*Schuld*), pada unsur ini terdapat dua macam bentuk yaitu dolus atau kesengajaan dan culpa atau ketidaksengajaan.

2. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana merupakan usaha untuk menanggulangi perbuatan pidana dengan cara penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan. Adapun penanggulangan

tindak pidana adalah suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana berupa sarana pidana (penal) dan maupun saran non-pidana (non penal) yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Bentuk penanggulangan berupa sarana penal dan non penal, antara lain:⁴³

- a. Penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat 2 (dua) masalah sentral, yaitu jenis perbuatan yang harus dijadikan tindak pidana dan jenis sanksi yang seharusnya diberikan, digunakan dan dikenakan pada pelanggar.
- b. Sarana non-penal yaitu meliputi penggunaan sarana sosial tertentu namun tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana.

3. Kepolisian

Sadjiono mengemukakan istilah polisi yaitu organ atau Lembaga pemerintah yang berada dalam suatu negara. Sedangkan kepolisian merupakan organ dan fungsi dari suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Kepolisian menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, pengayom, pelindung, pelayanan masyarakat, serta penegakan

⁴³ Hikmah Selasih, Skripsi “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal (Studi Pada Polres Pesawaran)*” Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm.20
<http://digilib.unila.ac.id/58185/20/SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf> , diakses 26 Februari 2020

hukum. Adapun Kadri Husin mengemukakan bahwa kewenangan polisi yaitu dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Jika peristiwa tertentu dianggap tindak pidana maka polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan.⁴⁴

Tugas dan wewenang kepolisian berdasarkan ketentuan perundang-undangan berdasarkan dimensi sosiologis yaitu fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dianggap perlu dan memiliki manfaat demi mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Sehingga lambat laun dilaksanakan atas dasar kesadaran diri serta kemauan masyarakat secara swakarsa kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁴⁵

Anton Sujata mengemukakan mengenai kepolisian yang professional harus memiliki aspek-aspek sebagai berikut:⁴⁶

- “a. integritas pelaksana, berupa kemampuan dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai etika, nilai baik buruk serta nurani dalam mengemban tugasnya;
- b. profesionalisme, berupa keterampilan serta loyalitas dalam menerapkan nilai-nilai kebenaran, baik procedural maupun substansial, berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun kepatutan;
- c. *public accountability*;
- d. pengawasan structural dan horizontal;
- e. kewenangan yang tidak mutlak;
- f. transparansi;
- g. *equality before the law*;

⁴⁴ *Op.Cit.*, hlm.37-38

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.39

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.42

h. tindakan tegas terhadap penyimpangan dalam rangka pencegahan”

4. Pertambangan Batubara Tanpa Izin (*Illegal Coal Mining*)

Suatu pertambangan batubara tanpa izin pada istilah bahasa inggrisnya disebut dengan *illegal coal mining*. Pertambangan batubara tanpa izin pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang minim, tidak memiliki izin pertambangan, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan pekerja, serta melibatkan pemodal dan pedagang.⁴⁷

Kegiatan pertambangan tanpa izin secara substansial menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan alam berupa batubara maupun galian tambang golongan lainnya, namun kebanyakan operasi pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan, dan mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Perkembangan pertambangan batubara tanpa izin serta merta menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar gelap atau dalam bahasa inggrisnya *black market trading*. Sehingga dapat dikategorikan pula sebagai suatu pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan produk pertambangan batubara.⁴⁸

⁴⁷ Iskandar Zulkarnain, “*Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya*” Institute for Essential Services Reform (IESR), Jakarta, 2019, hal.3
<http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf> , diakses 26 Februari 2020

⁴⁸ Danny Z. Herman, “*Pertambangan Kecil Tanpa Izin (PETI) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*”, Buletin Pusat Sumber Daya Geologi,

Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertambangan tanpa izin.⁴⁹

1. Faktor Regulasi

Faktor yang disebabkan adanya norma hukum yang bermasalah baik dalam pembentukan maupun pelaksanaannya. Faktor regulasi yang menimbulkan adanya pertambangan tanpa izin meliputi yaitu orma hukum dalam Undang-Undang Minerba yang tidak operasional, yaitu terdapat pada pasal 58 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengatur mengenai minimal luas wilayah pertambangan sebesar 5 (lima) hektar bagi pemohon izin usaha pertambangan pada tahap eksplorasi bagi komoditas batuan khususnya batubara. Walaupun dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 telah mengatur mengenai izin pertambangan rakyat (IPR) sesuai dengan karakteristiknya tetapi masih ada kendala pelaksanaan khususnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR) yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan finansial. Namun pada persyaratan teknis yang telah diatur pada pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang berbunyi:

http://psdg.geologi.esdm.go.id/buletin_pdf_file/Bul%20Vol%201%20no.%202%20thn%202006/6.WPR-2006_pak%20danny%20z%20herman_.pdf diakses 26 Februari 2020

⁴⁹ Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil” Jurnal Rechtvinding, vol.5 no.3, 2016, hlm.407-412

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%205.3%20WATERMARK.pdf> diakses 26 Februari 2020

“Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR”

Pada persyaratan tersebut dianggap tidak relevan bagi pertambangan rakyat karena pada wilayah pertambangan rakyat memiliki potensi sumuran kedalaman lebih dari 25 (dua puluh lima) meter, seharusnya menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan lebih dari 25 (dua puluh lima) *horse power* serta menggunakan bahan peledak.

2. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial adanya pertambangan tanpa izin yaitu keberadaan pertambangan rakyat sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia yang berarti sebelum adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang No.4 Tahun 2009. Selain itu, faktor ekonomi adanya pertambangan tanpa izin yaitu seseorang yang melakukan pertambangan skala kecil tradisional beranggapan bahwa kegiatan usaha tersebut warisan dari generasi-generasi sebelumnya sehingga tidak memerlukan adanya izin pertambangan. Adapula penyebab lain, yaitu faktor kemiskinan dan pengangguran menjadi pemicu adanya pertambangan tanpa izin karena melekat dengan kehidupan rakyat yang hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup.

3. Faktor Kendala Penegakan Hukum

Hukum pidana merupakan *ultimum remedium* yang sudah seharusnya ditegakkan, namun sebelum penegakan hukum pidana dilaksanakan, akan lebih bijak jika usaha pertambangan skala kecil diberikan wawasan bahwa pertambangan yang tidak memiliki izin telah melanggar ketentuan hukum pertambangan sehingga sebaiknya melakukan prosedur dan memenuhi persyaratan pengurusan izin pertambangan. Apabila pembinaan dan pengawasan telah diberikan terhadap pertambangan batubara tanpa izin namun tidak diperhatikan, maka penegakan hukum pidana sebagai sarana terakhir dapat dilakukan guna menuju ketertiban masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan, maka akan ada dampak yang ditimbulkan dari pertambangan batubara tanpa izin yaitu:

- a. Dampak kerusakan lingkungan, yaitu kegiatan pertambangan yang tidak melalui penerapan *good mining practices* dan tidak melakukan prinsip-prinsip pertambangan yang harus dipatuhi sehingga menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup.
- b. Dampak penerimaan negara, yaitu bagi pertambangan batubara tanpa izin tidak dapat memenuhi kewajiban fiskal sehingga tidak dikenai kewajiban perpajakan. Selain itu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang timbul dari kegiatan pertambangan batubara tanpa izin maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan reklamasi dan menjadi beban keuangan negara maupun daerah.

5. Sanksi Pidana Pada Orang Perseorangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Batubara Tanpa Izin

Sanksi merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu *sanctie* dan dalam bahasa Inggris disebut *sanction*. Adapun pengertian sanksi pidana di dalam KBBI yaitu :⁵⁰

- “1. Pengesahan atau peneguhan; atau
2. Tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati undang-undang; atau
3. Tindakan-tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara”

Sedangkan istilah dari pidana dalam bahasa Belanda yaitu *strafrechtelijke* dan bahasa Inggris yaitu *criminal*. Adapun pengertian pidana menurut Sudarto yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila dalam bidang pertambangan, Salim HS mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada orang maupun badan usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan bidang pertambangan. Pada pengertian tersebut maka terdapat unsur-unsur yang meliputi adanya hukuman, adanya orang maupun badan usaha, telah melanggar perundang-undangan serta bidang pertambangan.⁵¹

Sanksi pidana dapat dijatuhkan pada orang perseorangan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, karena telah diatur pasal 158

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses 26 Februari 2020

⁵¹ Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., *Op.Cit.*, hlm.289-290

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan bunyi:⁵²

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1.0 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, maka kegiatan pertambangan yang dilakukan disebut penambang tidak sah (*illegal mining*) khusus bagi bidang pertambangan batubara disebut *illegal coal mining*. Pada pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat 2 (lima) pasal khusus yang mengatur mengenai pertambangan batubara tanpa izin yang meliputi:⁵³

- a. Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, mengatur mengenai pejabat yang berwenang dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan (IUP) terdapat 3 (tiga) pejabat yang berwenang yaitu:
 - 1) Bupati/Walikota, jika wilayah izin usaha pertambangan berlokasi di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
 - 2) Gubernur, jika wilayah izin usaha pertambangan berada pada wilayah Kabupaten/Kota di dalam satu provinsi serta setelah

⁵² Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009

⁵³ *Op.Cit.*, hlm.299

mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan; dan

3) Menteri, jika wilayah izin usaha pertambangan berlokasi pada lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

b. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, mengatur mengenai kewajiban wewenang Bupati/Walikota dalam pemberian izin pertambangan rakyat (IPR).

Berdasarkan 2 (dua) pasal diatas maka Bupati/Walikota, Gubernur maupun Menteri memiliki kewenangan untuk pemberian izin usaha pertambangan. Bagi setiap orang yang melakukan pertambangan batubara tanpa izin maka dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin dari pejabat yang bewenang. Berdasarkan pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dijatuhi kepada orang perorangan yang melakukan pertambangan batubara tanpa izin yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

6. Penegakan Hukum Pidana Pertambangan Batubara

Istilah penegakan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtshandhaving* dan dalam bahas Inggris disebut *law enforcement*. Penegakan hukum merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan sudut subyeknya penegakan hukum diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. sedangkan dari sudut obyeknya yaitu hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal yaitu hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan hukum materiil yaitu mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁴

Pada bidang pertambangan, penegak hukum pidana atau lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas adanya kegiatan pertambangan batubara tanpa izin terdapat pada pasal 149 sampai 150 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Ada 2 (dua) golongan penyidikan di bidang pertambangan yaitu penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat pegawai negeri sipil. Pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai wewenang dari penyidik kepolisian meliputi:⁵⁵

- “a.melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c.membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d.menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

⁵⁴ Maizardi dan Ebit Bima Saputra, *Op. Cit*, hlm.73

⁵⁵ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002

- e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h.mengadakan penghentian penyidikan;
- i.menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j.mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k.memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Adapun Pejabat Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) yaitu pegawai sipil tertentu yang memiliki wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan di bidang pertambangan. Wewenang dari penyidik PNS diatur pada pasal 149 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- “a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.”


Selain kewenangan yang telah disebut diatas ada kewenangan lainnya dari Penyidik PNS yaitu:⁵⁶

- a. Dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan (Pasal 150 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009).
- b. Memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (pasal 150 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009).
- c. Mewajibkan menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana (pasal 150 ayat 3 Undang-Undang No.4 Tahun 2009)

Sejak era reformasi berakhir di dalam setiap penegakan hukum khususnya pada proses penyidikan, penyidik telah merubah langkah-langkah penyidikan. Khususnya dalam mengejar pengakuan tersangka dengan langkah-langkah sebagai berikut: ⁵⁷

⁵⁶ Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., *Op.Cit.*, hlm.296

⁵⁷ Maizardi dan Ebit Bima Saputra, *Op. Cit*, hlm.74-75

- 
- a. Pada saat meminta keterangan seorang tersangka, penyidik tetap berusaha memperhatikan hak-hak asasi tersangka selama proses penyidikan berlangsung;
 - b. Pada saat tersangka tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya maka penyidik berusaha melakukan konfrontir dengan para saksi sehingga tersangka mengakui perbuatannya tersebut;
 - c. Saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maka penyidik tidak lagi selalu bertumpu pada pengakuan tersangka maupun saksi, melainkan mengumpulkan alat-alat bukti semaksimal mungkin sehingga peran tersangka terlihat dalam suatu peristiwa pidana yang dilakukan;
 - d. Mengenai penyidik dalam mengejar pengakuan tersangka tidak lagi menggunakan sistem interogasi yang acusatoir melainkan lebih menggunakan teknik interograsi yang mengedepan intelektual